

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam melimpah dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sebagai negara berkembang Indonesia melakukan usaha pembangunan semenjak masa reformasi sampai sekarang. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses usaha untuk meningkatkan pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan tingkat pertambahan penduduk disertai dengan adanya perubahan mendasar dalam struktur ekonomi suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu negara. Dalam proses pembangunan ekonomi, pemerintah melakukan upaya-upaya untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang berlangsung di Indonesia tidak selamanya berjalan dengan lancar. Ada berbagai macam masalah pembangunan ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia, salah satunya yaitu masalah pengangguran.

Sejumlah faktor menentukan tingkat dan laju pertumbuhan standar kehidupan suatu negara dan penentu standar kehidupan yang terlihat jelas adalah tinggi rendahnya tingkat pengangguran. Orang-orang yang ingin bekerja tetapi tidak menemukan pekerjaan berarti tidak memberikan kontribusi terhadap produksi barang dan jasa. Jumlah pengangguran bervariasi dari satu negara ke

negara lain begitu pula dari waktu ke waktu dan tingkat pengangguran yang dihadapi Indonesia masih cukup tinggi dari tahun ke tahun.

Masalah pengangguran tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan membawa akibat yang cukup besar bagi masyarakat maupun negara, mulai dari kemiskinan hingga tindakan kriminal. Tinggi rendahnya tingkat pengangguran dapat menggambarkan kondisi perekonomian suatu negara, apakah perekonomian negara tersebut sedang mengalami perkembangan atau kemunduran. Kondisi pengangguran menunjukkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia atau yang mampu menyerapnya. Berikut ini merupakan data tentang tingkat pengangguran terbuka di Indonesia dari tahun 2007 – 2013 per Agustus menurut Badan Pusat Statistik sebagaimana terlihat pada tabel I.1 :

Tabel I.1

Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun 2007-2013 (dalam %)

Pengangguran Terbuka di Indonesia	Tahun (%)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	9,11	8,39	7,87	7,14	6,56	6,14	6,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah, 2014

Data statistik menunjukkan dari tahun 2007 ke tahun 2008 tingkat pengangguran mengalami peningkatan kemudian dari tahun 2008 hingga tahun 2012 tingkat pengangguran selalu mengalami penurunan dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2013, namun tingkat pengangguran tersebut masih tergolong tinggi melihat masih banyaknya pula penduduk di Indonesia yang tenaga kerjanya

tidak terserap dengan baik. Selain itu, tingkat pengangguran di Indonesia berada di atas tingkat pengangguran normal yang hanya berkisar 3-4 % dan hal tersebut merupakan suatu masalah yang harus segera diatasi karena semakin tinggi tingkat pengangguran yang terjadi maka akan semakin berkurang tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Masalah sosial yang dihadapi berbagai kota besar di Indonesia saat ini salah satunya adalah berkembangnya jumlah pendatang liar dan arus urbanisasi berlebih (*over urbanization*) yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Daya dukung dan tampung kota tidak lagi mampu mengimbangi penambahan arus para migran yang terus bertambah dari waktu ke waktu.

Konsekuensi atas melonjaknya arus urbanisasi adalah meledaknya jumlah pencari kerja, baik di sektor modern (formal) maupun di sektor informal dalam perekonomian perkotaan. Di banyak negara berkembang, tingkat penawaran tenaga kerja tersebut jauh melebihi tingkat permintaan yang ada sehingga mengakibatkan tingginya angka pengangguran dan semi pengangguran di daerah-daerah perkotaan¹.

Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki masalah dalam ketenagakerjaannya adalah Provinsi Banten. Provinsi Banten memiliki tingkat pengangguran yang tinggi dan masuk ke dalam posisi pertama provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi per Februari 2013.

Berdasarkan data terakhir pada Agustus 2013 Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Banten berpartisipasi menyumbangkan total jumlah pengangguran sebanyak 552.900 orang dengan tingkat pengangguran sebesar 10,10 persen.

¹ Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2006), p. 400

Menurut Kasubdit Analisa Sosial Ekonomi Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan (Bappenas) Sumedi Andono Mulyo:

Masalah pengangguran harus menjadi fokus perhatian Pemerintah Provinsi Banten karena berkaitan dengan migrasi penduduk dari luar ke daerah ini, sehingga pemerintah provinsi harus berusaha menciptakan lapangan kerja, percepatan pembangunan pedesaan serta revitalisasi pertanian. Ada beberapa faktor mendasar yang menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, termasuk di Provinsi Banten. Beberapa diantaranya yaitu adanya ketidaksesuaian hasil yang dicapai antara pendidikan dengan lapangan kerja, ketidakseimbangan *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran) serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan masih rendah. Pada umumnya lapangan pekerjaan yang membutuhkan tenaga kerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan atau keterampilan yang dimiliki².

Berikut ini merupakan data provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi per Februari 2013 menurut Badan Pusat Statistik *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, dimana Provinsi Banten menempati urutan posisi pertama³.

Tabel I.2
10 Provinsi dengan Tingkat Pengangguran Terbuka Tertinggi,
per Februari 2013

No	Provinsi	Pengangguran (orang)	Tingkat Pengangguran (%)
1	Banten	552.900	10,10
2	DKI Jakarta	513.200	9,94
3	Jawa Barat	1.815.300	8,90
4	Kalimantan Timur	167.600	8,87
5	Aceh	177.800	8,38

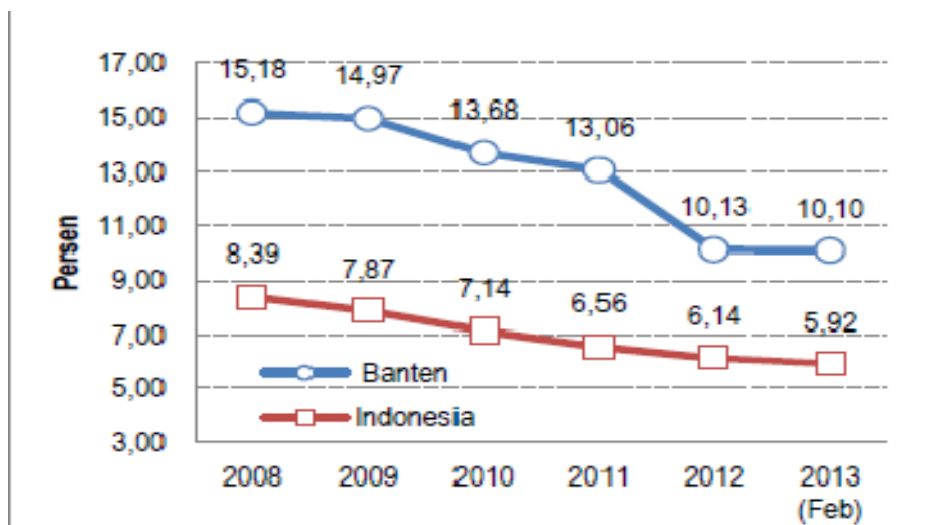
² Mulyana, *Banten Diminta Fokus Atasi Masalah Pengangguran*, Februari 2013, p. 1 (<http://www.antarabanten.com/berita/18473/banten-diminta-fokus-atasi-masalah-pengangguran>), diakses tanggal 10 Maret 2014 pukul 19.45

³ Badan Pusat Statistik, *Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi*, Edisi 40 September 2013, p. 49

6	Sulawesi Utara	78.300	7,19
7	Maluku	48.100	6,73
8	Kepulauan Riau	60.700	6,39
9	Sumatera Barat	151.300	6,33
10	Sumatera Utara	387.900	6,01

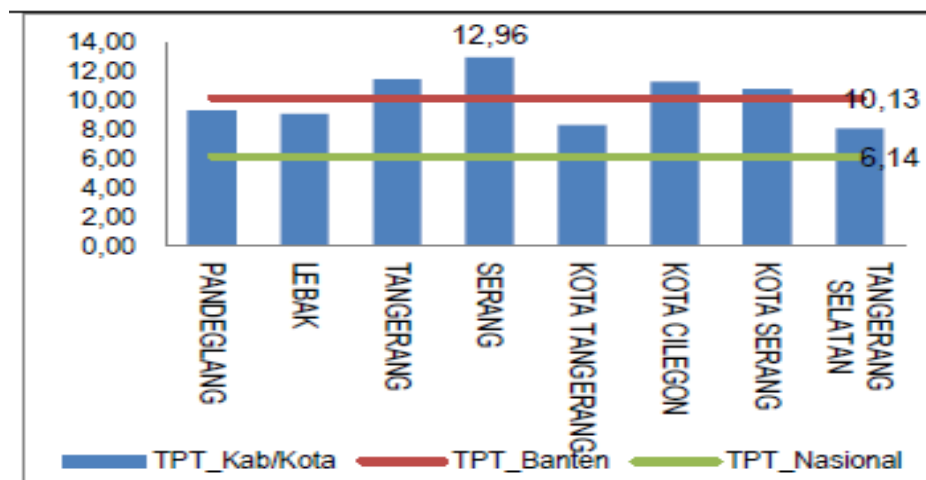
Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah, 2014

Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi Banten dalam lima tahun terakhir menurut jumlah penduduk usia kerja dan penduduk bekerja secara absolut menunjukkan peningkatan dan jumlah pengangguran terbuka cenderung menurun.



Sumber: Sakernas (Agustus), BPS 2012

Gambar I.1
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Banten terhadap Nasional Tahun 2008-2013



Sumber: Sakernas (Agustus), BPS 2012

Gambar I.2

Perbandingan Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota terhadap Provinsi dan Nasional Tahun 2012

Jumlah pengangguran terbuka di Provinsi Banten pada tahun 2013 (Februari) mencapai 552.900 jiwa menurun dibanding tahun 2008 (656.560 jiwa) atau berkurang sebanyak 103.660 jiwa. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka selama periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menurun sebesar 5,08 persen, tingkat pengangguran terbuka Banten tahun 2013 masih tergolong tinggi diatas rata-rata nasional yaitu mencapai 10,10 persen. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka tahun 2012 terbesar di Kabupaten Serang sebesar 12,96 persen dan terendah di Kota Tangerang Selatan (8,07 persen)⁴.

Tinggi rendahnya tingkat pengangguran merupakan hal penting dalam pembangunan ekonomi dan beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional dan tingkat pendidikan.

Inflasi dan tingkat pengangguran merupakan tolak ukur dalam kesehatan perekonomian. Inflasi merupakan keadaan dimana terjadi kenaikan suatu harga atas barang-barang secara umum dari waktu ke waktu secara terus menerus.

⁴ Sakernas, *Profil Pembangunan Provinsi Banten*, 2013, p. 4

Menurut Sukirno, penyebab inflasi dibedakan menjadi tiga bentuk. Pertama, inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi ketika perekonomian sedang berkembang pesat. Kedua, inflasi desakan biaya, inflasi ini terjadi ketika perekonomian juga sedang berkembang pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Ketiga, inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang yang diimpor mengalami kenaikan harga yang mempunyai peran penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan⁵.

Ketika semakin banyak pengusaha yang memperluas kesempatan kerja maka semakin ia harus melakukan pembayaran lebih banyak untuk faktor produksi, hal tersebut akan meningkatkan biaya unit produksi dan untuk mempertahankan profitabilitas produk maka perusahaan akan meningkatkan harga produk tersebut. Hal yang serupa juga dapat terjadi di dalam perekonomian, ketika pemerintah ingin menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, maka harga produk barang atau jasa akan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika pemerintah berniat untuk menurunkan tingkat pengangguran maka perekonomian nasional akan menanggung kenaikan tingkat inflasi.

Kenaikan permintaan agregat barang dan jasa dalam jangka pendek mengakibatkan jumlah hasil produksi barang dan jasa yang lebih besar dan tingkat harga yang lebih tinggi. Jumlah hasil produksi yang semakin besar berarti semakin banyak lapangan pekerjaan dan dengan demikian semakin rendah tingkat pengangguran. Selain itu, berapa pun tingkat harga pada tahun sebelumnya, semakin tinggi tingkat harga pada tahun yang sekarang, maka semakin tinggi tingkat inflasinya. Jadi pergeseran pada permintaan agregat mendorong inflasi dan pengangguran ke arah yang berbeda dalam jangka pendek⁶.

⁵ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Makro Ekonomi Edisi Ketiga* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), p. 333

⁶ N. Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Makro* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), p. 361

Tingkat pengangguran juga dipengaruhi oleh upah. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu wilayah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Mankiw mengatakan “jika upah dipaksa berada di atas titik keseimbangan untuk alasan apapun, pengangguran akan muncul”⁷. Ketika pencarian kerja merupakan alasan terjadinya pengangguran, para pekerja sedang mencari pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan keahlian mereka. Sebaliknya, ketika upah berada di atas tingkat keseimbangan, jumlah penawaran tenaga kerja melebihi jumlah permintaannya dan sebagian pencari kerja menganggur karena mereka sedang menunggu dibukanya lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran. Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Apabila PDRB di suatu wilayah meningkat, hal tersebut menunjukkan semakin banyaknya nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan merupakan gambaran dari adanya pertumbuhan angkatan kerja, akumulasi modal dan kemajuan teknologi.

Hal yang paling utama adalah:

Menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya didorong oleh pasar modal dan padat modal namun menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi yang didorong oleh industri padat karya agar dapat menciptakan lapangan kerja dan tingkat pengangguran dapat berkurang⁸.

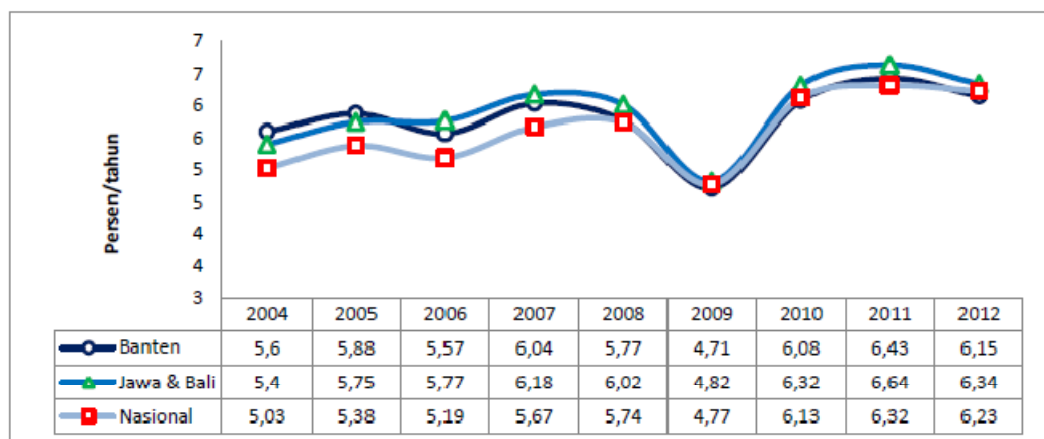
⁷ N. Gregory Mankiw, *op. cit.*, p. 148

⁸ Rekson Silaban, *Reposisi Gerakan Buruh* (Jakarta: PT. Grafindo, 2009), p. 50

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan hal itu dapat tercipta apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi didorong oleh industri padat karya sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

Selama periode 2004 sampai 2009, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan terjadi di Indonesia adalah antara 4,5 persen sampai 6,0 persen. Pertumbuhan ekonomi sebesar itu diperkirakan hanya dapat menyerap angkatan kerja baru sekitar 1 juta sampai 1,5 juta tenaga kerja saja. Pada masa lalu, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen mampu menyerap sekitar 400 ribu tenaga kerja (elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja). Namun, pada saat ini diperkirakan hanya mampu menyerap sebanyak 250 ribu sampai 300 ribu tenaga kerja baru. Sementara angkatan kerja baru setiap tahunnya bertambah sebesar 2,5 juta orang⁹.

Perkembangan ekonomi Banten dalam tiga tahun terakhir mengalami percepatan, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2012 mencapai 6,15% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.



Sumber: Profil Pembangunan Provinsi Banten 2013

Gambar I.3
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten terhadap Nasional
Tahun 2004-2012 (dalam %)

⁹ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: STIM YKPN Yogyakarta, 2010), p. 360

Sementara untuk pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota, seluruh kabupaten/kota rata-rata tumbuh positif, dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Tangerang dengan laju pertumbuhan sebesar 7,35% dan pertumbuhan terendah di Kabupaten Pandeglang dengan laju pertumbuhan sebesar 5,40% dan Kabupaten Serang dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,67%.

Tabel I.3
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2000 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2007-2011 (%)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2007	2008	2009	2010*	2011**
Kab. Pandeglang	4,48	4,29	5,43	7,16	5,40
Kab. Lebak	4,90	4,06	5,18	6,59	6,44
Kab. Tangerang	6,61	6,17	4,41	6,71	7,35
Kab. Serang	5,12	4,41	3,18	4,15	5,67
Kota Tangerang	6,86	6,37	5,74	6,68	7,03
Kota Cilegon	5,53	5,13	5,08	5,32	6,53
BANTEN	6,04	5,77	4,71	6,08	6,43

Sumber: BPS, 2011

Semakin tinggi nilai PDRB di suatu wilayah maka menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Tingginya pertumbuhan ekonomi dapat menyerap angkatan kerja yang tersedia dan semakin bertambahnya jumlah orang yang bekerja maka mengindikasikan bahwa jumlah orang yang menganggur semakin berkurang. PDRB merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tingkat pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, manusia dapat mencapai kehidupan yang memuaskan dengan tingkatan yang lebih baik.

Di sebagian besar negara-negara Dunia Ketiga, bagian terbesar anggaran pengeluaran pemerintah dialokasikan ke sektor pendidikan. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan¹⁰.

Tingkat pendidikan merupakan modal yang sangat penting untuk perbaikan kondisi hidup suatu masyarakat pada suatu daerah. Tingkat pendidikan dapat diukur dari rata-rata lama sekolah.

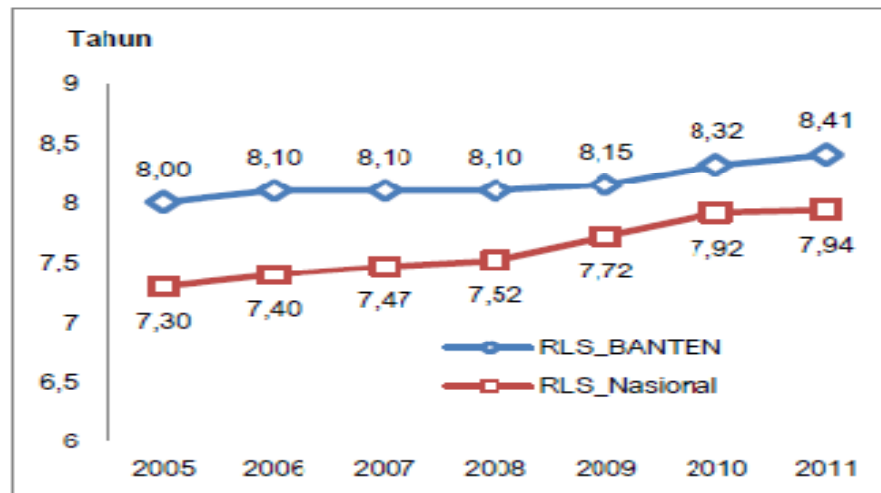
Dilihat dari perkembangannya selama tahun 2004 sampai dengan 2009, rata-rata lama sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2004 rata-rata lama sekolah mencapai 7,2 tahun dan terus meningkat hingga 7,7 tahun pada tahun 2009. Akan tetapi secara umum selama kurun waktu tersebut, rata-rata lama sekolah penduduk masih relatif rendah dan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan, yaitu baru mencapai sekitar kelas 8 atau kelas dua Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Atau dengan kata lain rata-rata penduduk di Indonesia baru mampu menempuh pendidikan hanya sampai kelas 7 atau kelas satu SLTP dan putus sekolah di kelas 8 atau kelas dua SLTP¹¹.

Secara umum kondisi pendidikan di Provinsi Banten menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir (2005-2011). Pada tahun 2011 rata-rata lama sekolah mencapai 8,41 tahun di atas rata-rata nasional. Sementara untuk perbandingan rata-rata lama sekolah antar kabupaten/kota tahun 2011, rata-rata

¹⁰ Michael P. Todaro, *op. cit.*, p. 434

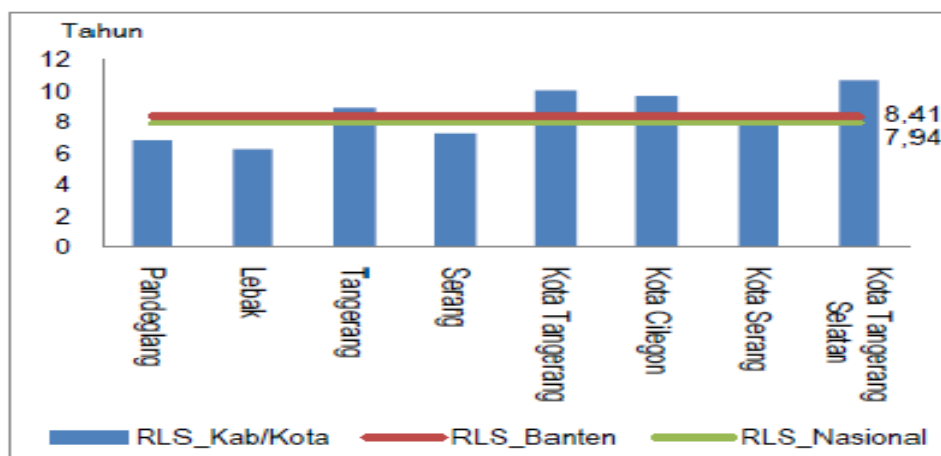
¹¹ Badan Pusat Statistik, *Profil Indikator Pendidikan Indonesia 2009* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2009), p. 87

lama sekolah tertinggi terdapat di Kota Tangerang Selatan (10,70 tahun) dan terendah di Kabupaten Lebak (6,25 tahun).



Sumber: BPS, 2011

Gambar I.4
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Banten
Tahun 2005-2011



Sumber: BPS, 2011

Gambar I.5
Perbandingan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2011

Tingkat pendidikan tinggi yang diperoleh melalui rata-rata lama sekolah dan dibekali oleh keahlian serta keterampilan yang memadai, akan mempermudah seseorang dalam memasuki dunia kerja sehingga tenaga kerja yang ada dapat terserap dengan baik dan tingkat pengangguran dapat berkurang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat diketahui bahwa di Provinsi Banten tingkat pengangguran yang terjadi tergolong tinggi selama periode waktu tahun 2007 hingga tahun 2012 dan tingkat pengangguran yang tinggi ini merupakan suatu fenomena ekonomi yang terjadi di Provinsi Banten.

Tingginya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?
4. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, ternyata masalah pengangguran memiliki penyebab yang luas. Maka penelitian ini dibatasi pada masalah:

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.
2. Pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?
2. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?
3. Apakah terdapat pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis

Penelitian ini dapat berguna untuk menambah referensi dan khasanah ilmu tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan serta pengaruhnya

terhadap tingkat pengangguran sehingga penelitian ini dapat menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan, masukan serta referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga penelitian ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluasi tentang pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan dalam kaitannya dengan tingkat pengangguran.